

# PENGELOLAAN ANGGARAN NEGARA-NEGARA OKI DALAM UPAYA STABILISASI EKONOMI DI TENGAH WABAH COVID-19

**Shindu D. Ratmoro<sup>1</sup>, Masdhuki Zakaria<sup>2</sup>,**

**Gandhi R. Trihatmojo<sup>3</sup>, Laila M. Pimada<sup>4</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

[shinduratmoro@student.ub.ac.id](mailto:shinduratmoro@student.ub.ac.id), [masdhuki\\_zaka@student.ub.ac.id](mailto:masdhuki_zaka@student.ub.ac.id),

[gandhiraka@student.ub.ac.id](mailto:gandhiraka@student.ub.ac.id), [lailapimada@ub.ac.id](mailto:lailapimada@ub.ac.id)

## **Abstrak**

Pada akhir tahun 2019, virus covid-19 mewabah di Negara Cina hingga akhirnya ditetapkan sebagai pandemi global. Pandemi berdampak masif kepada perekonomian Indonesia. Meningkatnya angka pengangguran dan sulitnya memenuhi kebutuhan sehari-hari menjadi permasalahan utama akibat pandemi ini. Keadaan serupa pun dialami oleh negara Malaysia dan Arab Saudi. Satu kesamaan yang mendasar dari ketiga negara ialah catatan penyebaran virus Covid-19 yang tiap harinya terus mengalami kenaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai sejauh mana langkah pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Malaysia dan Arab Saudi dalam upaya mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Dengan menggunakan Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti melakukan perbandingan kebijakan pengelolaan anggaran dari ketiga negara tersebut dan melihat hasil yang diperoleh terkait stabilitas ekonomi di negara tersebut. Dibanding dengan Malaysia, Indonesia masih kurang maksimal dalam pemberian bantuan dana. Dapat dilihat Pemerintah Malaysia lebih banyak menyalurkan anggaran kepada masyarakatnya yang jumlahnya lebih sedikit dari Indonesia. Arab Saudi lebih tanggap dalam mencegah Covid-19 dibanding Indonesia, dilihat dari respons cepat saat mengeluarkan kebijakan bahkan sebelum terjadi kasus positif di negaranya. Upaya pemulihan ekonomi yang diterapkan di Indonesia banyaknya berupa keringanan dalam pembayaran pajak, sementara pada Arab Saudi lebih banyak pada sektor swasta.

**Kata Kunci:** *Anggaran, Total Kasus, Kebijakan*

## 1. Pendahuluan

Pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan kasus mewabahnya virus covid-19 di Negara Cina. Virus corona adalah sekelompok virus yang diketahui menjangkit hewan dan manusia. Pada manusia, virus ini menyebabkan gangguan pernapasan dengan jangkauan ringan hingga akut. Yang membuat wabah virus corona ini menjadi sangat mengerikan ialah penyebarannya yang cepat sekali. Penyebaran virus corona ini tidak melalui media udara, melainkan melalui *droplets* (tetesan air) sehingga ini menyulitkan masyarakat untuk mengantisipasi penyebaran semakin parah.

Penyebab pasti pada penyebaran virus corona ini pada dasarnya tidak diketahui, tetapi pada awal Bulan Januari otoritas kesehatan di China menyatakan bahwa penyebaran ini dimulai dari jenis virus corona yang sebelumnya belum pernah ditemukan pada manusia. Kemudian pemerintah Cina mengumumkan informasi terkait *genetic sequence* pada virus corona agar negara lain dapat membuat persiapan tes diagnosis.

Pada pertengahan bulan Mei, tepatnya pada 17 Mei 2020 otoritas kesehatan China telah menyatakan bahwa jumlah pasien yang terjangkit covid-19 berjumlah 82.941 dengan kasus kematian sebanyak 4.633 – kebanyakan dari mereka berasal dari provinsi Hubei. Di pertengahan bulan Mei ini kasus penyebaran dan jumlah pasien yang terinfeksi virus corona sudah mulai surut. Tercatat pada 15 Mei, kasus baru pasien yang terinfeksi tercatat hanya delapan orang saja. Hal tersebut menunjukkan kondisi China yang sudah berangsur membaik sejak pertengahan Februari lalu yang menjadi momen puncak mewabahnya virus Covid-19 hingga mencatat hampir 20.000 kasus pasien terjangkit dalam satu hari.

Di Indonesia sendiri kasus terkini yang dikonfirmasi terjangkit virus corona sebanyak 17.025 dengan jumlah korban meninggal sebanyak 1.089. Dengan demikian pemerintah memberikan himbauan untuk melaksanakan *social distancing*. Dengan adanya himbauan untuk *social distancing* maka banyak perusahaan-perusahaan yang menerpakan mekanisme bekerja dari rumah masing-masing atau dikenal dengan istilah *work from home*. Hal ini terus dikampanyekan oleh pemerintah dan penggiat tenaga kesehatan demi menekan penyebaran virus corona semakin parah.

Dengan penerapan *social distancing* dan segala aktivitas yang terhambat akibat corona, memiliki dampak yang cukup masif kepada perekonomian Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan RI mencatat jumlah karyawan yang dirumahkan sementara waktu dan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mencapai 2 juta orang dan berasal dari setidaknya lebih dari 11 ribu perusahaan. Tentunya pengangguran ini menyebabkan berbagai dampak seperti naiknya tingkat kemiskinan. Kemiskinan ini juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi karena tingkat konsumsinya menurun. Tentunya pemerintah mempunyai beberapa langkah untuk mengatasi efek yang berkelanjutan dari dampak Covid-19 ini.

Pemerintah pun bergerak menetapkan kebijakan ekonomi dalam menanggapi pandemi ini. Dilansir dari situs resmi kepresidenan presidenri.go.id, pada konferensi pers yang diadakan di Istana Bogor pada 31 Maret 2020, Presiden Indonesia Joko

Widodo menyatakan akan menyiapkan anggaran sebesar 405,1 triliun rupiah untuk penanganan Covid-19. Anggaran tersebut meliputi bantuan langsung, pembebasan PPh Impor, dan pembebasan listrik untuk kalangan 450 VA.

Keadaan serupa pun dialami oleh negara Malaysia dan Arab Saudi. Dikutip dari data statistik milik WHO (*World's Health Organization*), per 10 Mei 2020, tercatat kasus positif yang telah dikonfirmasi di Arab Saudi sebanyak 39.048 dan di Malaysia sebanyak 6.656. Satu kesamaan dalam upaya mempertahankan stabilitas ekonomi Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini mencoba membandingkan kinerja pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang mendasar dari ketiga negara ialah catatan penyebaran virus Covid-19 yang tiap harinya terus mengalami kenaikan.

Dengan uraian yang telah disebutkan di atas, maka tersusunlah tujuan dari penelitian ini berupa menilai sejauh mana langkah pemerintah Indonesia dibandingkan dengan pemerintah Malaysia dan Arab Saudi telah dikeluarkan dalam respons terhadap pandemi global Covid-19. Dengan demikian dapat Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mencontoh beberapa kebijakan dari negara-negara tersebut yang dikira dapat diterapkan.

## 2. Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis

Sekumpulan virus dari subfamili Orthocoronavirinae dalam keluarga *Coronaviridae* dan ordo *Nidovirales* bisa disebut sebagai Coronavirus. Unggas dan hewan jenis mamalia, termasuk manusia dapat terkena dampak dari sekumpulan virus ini. Coronavirus mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek terhadap manusia, meskipun beberapa bentuk penyakit seperti; SARS, MERS, dan COVID-19 sifatnya mematikan. (Yunus & Rezki, 2020)

Coronavirus telah ditemukan pada tikus, ayam, kalkun, babi, anjing, kucing, kuda, sapi, dan manusia, dan dapat menyebabkan berbagai macam penyakit mematikan seperti gastroenteritis dan penyakit lain yang berasal dari sistem pernapasan. (Holmes, 1996)

Virus corona telah menjangkit banyak korban di dunia ini sehingga status Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi. Pandemi adalah kondisi dimana suatu wabah atau telah menyebar secara global. Itu bermakna bahwa wabah tersebut tidak hanya menyebar dan berbahaya bagi suatu negara tapi juga berbahaya bagi seluruh dunia. (Arum, 2020)

APBN atau yang biasa disingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dapat didefinisikan sebagai alat pemerintah yang utama untuk mensejahterakan rakyat serta alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. (BPHN, 2011)

Keuangan negara menurut salah satu ahli hukum yaitu Geodhart didefinisikan sebagai seluruh undang – undang yang ditetapkan secara periodik yang dapat memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melakukan pengeluaran

mengenai periode tertentu dan menggunakan alat pembiayaan untuk menutupi pengeluaran tersebut. (Tjandra, 2006)

Dilihat dari UUD 1945 yang tercantum pada pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah setiap tahunnya wajib untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lalu setelah itu rancangan tersebut dibahas lebih lanjut serta disetujui oleh Dewan Perwakilan rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, sebagai petunjuk penyelenggaraan pemerintah dalam sektor financial. (BPHN, 2011)

Tidak dapat dipungkiri wabah virus corona ini menimbulkan kerugian besar. Kerugian yang paling terlihat dari suatu pandemi yaitu kerugian agregat secara nasional. Namun karena bersifat makro, maka perhitungan ini hanya digunakan oleh pelaku ekonomi skala besar, atau oleh negara dalam menyusun (revisi) APBN. (Hadiwardoyo)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 semula diperkirakan sebesar 5,3%, Namun angka ini terkoreksi sebagai dampak pandemi Corona, dan sebagian kalangan memprediksikan pertumbuhan di bawah 2%. (Hadiwardoyo)

Dalam menghadapi virus corona yang telah menjadi pandemi global, maka karantina kesehatan merupakan keputusan yang tepat. Undang-undang telah Mengatur karantina kesehatan, tepatnya UU Nomor 6 Tahun 2018. Karantina kesehatan adalah langkah yang tepat guna dalam menangani bencana wabah yang telah menimbulkan dampak yang besar bagi negara. Karantina Kesehatan mengatur mengenai adanya limitasi terhadap akses individu ke daerah sumber wabah. Dan juga mengatur mengenai perintah melaksanakan isolasi, karantina wilayah, vaksinasi dan hal-hal lain yang berguna dalam proses pemberhentian penyebaran wabah. (Setiawan 2020)

Guna menangani pandemi ini, kebijakan subsidi biasanya dilakukan oleh berbagai negara di belahan dunia. Subsidi merupakan langkah kebijakan yang diambil pemerintah berupa pembayaran kepada pihak swasta atau masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi beban dalam mengkonsumsi dan meningkatkan efektivitas dalam memproduksi. Secara ekonomi, tujuan dari subsidi adalah meringankan beban harga atau meningkatkan produktivitas. (Spencer, 1993)

Dalam menyusun kebijakan subsidi ruang fiskal digunakan dua pendekatan. Pertama, anggaran subsidi dalam satu blok anggaran khusus subsidi di letakan oleh pemerintah. Di dalam blok anggaran ini terdapat dua jenis subsidi yaitu energi dan non energi. Yang kedua program subsidi untuk anggaran kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya diletakan pada program kebijakan pembangunan di kementerian dan kelembagaan di pemerintah dan pemerintah daerah melalui APBD. (Budiantoro, n.d.)

Terdapat dua model dalam pembiayaan subsidi dalam konteks kebijakan fiskal. Pertama, subsidi langsung seperti subsidi kepada target – target tertentu dalam program subsidi, contohnya adalah subsidi beras untuk masyarakat miskin. Yang kedua adalah subsidi tidak langsung yang fungsinya adalah untuk intervensi pasar, contohnya adalah subsidi harga terhadap BBM. (Budiantoro, n.d.)

Barang dan jasa memiliki yang memiliki eksternalitas bersifat positif mempunyai keterkaitan dengan kebijakan subsidi. Tujuan dasar dari subsidi yaitu meningkatkan output dan menambah sumber daya pada barang dan jasa tersebut. (Munawar et al., 2013)

Efek negative subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien secara umum. Konsumen cenderung berperilaku boros dalam mengkonsumsi barang sebab konsumen membayar lebih rendah dari harga pasar. Selain itu subsidi juga menyebabkan adanya distorsi harga. (Munawar et al., 2013)

Menurut Basri, subsidi yang tertutup dan tidak tertuju dengan baik akan mengakibatkan:

- Distorsi baru dalam perekonomian dapat tercipta ketika menggunakan subsidi besar yang digunakan untuk program populis.
- Subsidi mendatangkan kondisi yang tidak efisien

Subsidi tidak dapat dinikmati oleh konsumen yang mampu membayar di harga pasar (Faisal, n.d.)

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode deskriptif menggambarkan situasi atau peristiwa dalam tahap perkembangannya. Pada metode penelitian ini fokusnya bukanlah pada penjabaran hubungan variabel, bukan pula pada pengujian hipotesis atau pembuatan prediksi (Rakhmat, 2012:24). Data diperoleh melalui ukuran kecenderungan pusat atau kecenderungan sebaran. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengembangkan permasalahan suatu peristiwadengan cara pengembangan masalah secara rasional.

Penelitian kali ini menggunakan data sekunder. Data diambil dari pihak lain dan kemudian dikemas dengan baik dan lalu disajikan baik dalam bentuk table maupun diagram. Sehingga data tersebut tidak diambil secara langsung dari objek dan juga subjek penelitian tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu. Sumber data dari penelitian ini bersumber dari data Badan Pusat Statistika (BPS), Orientasi Jasa Keuangan (OJK), Data Penerimaan Pajak Nasional yang bisa didapatkan melalui Dirjen Perbendaharaan, beberapa artikel yang teraudit, dan literatur terdahulu, serta jurnal nasional maupun international.

Teknik studi kepustakaan dipilih sebagai teknik untuk pengumpulan data. Dengan teknik studi kepustakaan berarti peneliti mencoba mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dan sesuai dengan apa yang menjadi topik dan masalah yang diteliti. Dengan demikian peneliti dapat menemukan informasi-informasi penting yang didapat dari penelitian sejenis atau yang memiliki topik pembahasan dan masalah yang serupa. Teknik studi kepustakaan sendiri merupakan teknik yang menggabungkan semua sumber data yang diperoleh dari beberapa literatur, artikel, jurnal, maupun informasi yang terpercaya lainnya. Setelah menemukan berbagai sumber penelitian, selanjutnya penelitian ini dianalisis serta

dilakukan perbandingan dengan beberapa sumber kepustakaan yang bertujuan untuk dapat memberikan data yang bersifat teoretis.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

##### 4.1 Dampak dan Kebijakan yang Dilakukan dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Indonesia

Dengan menjadinya Covid-19 sebagai pandemi global dan telah tercatat berbagai kasus terkonfirmasi di Indonesia, maka pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan *social distancing* yang kemudian memiliki efek domino hingga pada sektor perekonomian Indonesia. Tercatat sebanyak 11.000 – 16.000 karyawan dipulangkan dikarenakan perusahaan mengalami kesulitan menghadapi wabah ini. Dikutip dari Katadata, virus corona berdampak kepada penurunan produksi dari perusahaan manufaktur. Dengan demikian, impor bahan baku pun menurun. Hasil akhir dari proses manufaktur pun akan berimbas pada penurunan ekspor karena berkurangnya kuantitas permintaan.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam upaya menstabilkan kondisi perekonomian yang bergejolak akibat virus corona. Pada konferensi pers di Istana Bogor, Presiden Indonesia menyatakan poin-poin yang menjadi fokus dalam pengelolaan anggaran di antaranya pada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi. Dengan tambahan belanja pada APBN, Presiden Jokowi menyatakan bahwa telah digelontorkan dana sebesar 405,1 triliun rupiah dalam pembiayaan tersebut.

Pada bidang kesehatan, disediakan dana sebesar 75 triliun rupiah untuk perlindungan terhadap tenaga kesehatan yang harus bekerja ekstra pada kondisi ini. Anggaran tersebut terdiri dari pembelian keperluan-keperluan medis seperti APD, alat uji coba, dll. selain itu, santunan kepada keluarga tenaga medis yang meninggal dunia dalam pekerjaan juga telah disediakan sebesar 300 juta rupiah. Insentif bulanan juga ditambahkan kepada para tenaga medis yang bertugas.

Prioritas selanjutnya pada belanja tambahan ini ialah perlindungan sosial. Prioritas diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH. Selain itu juga penerima kartu sembako dinaikkan menjadi 20 juta penerima. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pemerintah memberikan keringanan berupa tarif listrik gratis kepada masyarakat yang menggunakan listrik 400 VA dalam jangka waktu 3 bulan.

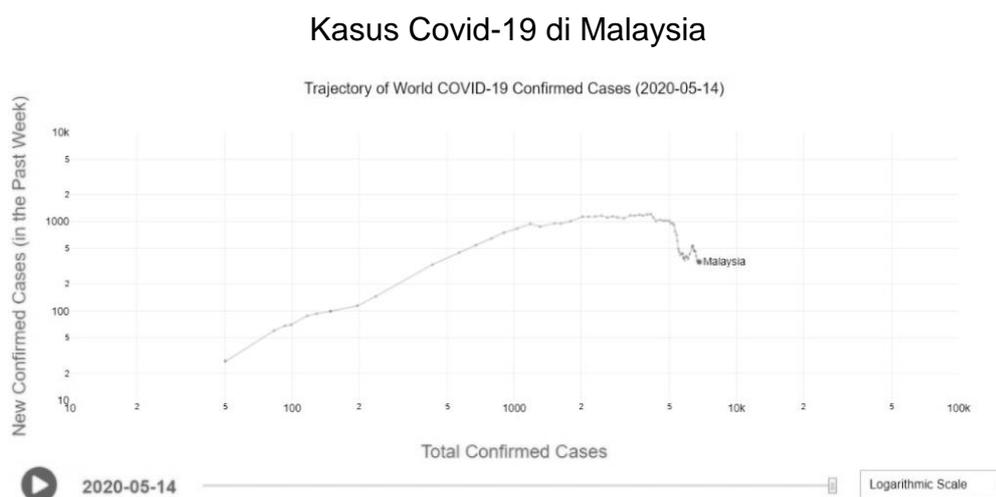
Dalam rangka merespons angka pengangguran yang tinggi, pemerintah menaikkan anggaran pada kartu prakerja menjadi 20 triliun rupiah. Serta penerima manfaat berubah menjadi 5,6 juta orang dengan total nilai manfaat sebesar 650 ribu rupiah hingga 1 juta rupiah untuk setiap bulannya selama 4 bulan.

Pemulihan pada ekonomi menjadi prioritas ke tiga dari tambahan belanja pada APBN ini. Pemerintah mengeluarkan dana sebesar 150 triliun rupiah pada program pemulihan ekonomi. Dengan dana tersebut, pemerintah melakukan penanggung-jan terhadap pajak penghasilan pekerja (PPh 21) di sektor industri pengolahan yang menghasilkan maksimal 200 juta rupiah pada kurun waktu satu tahun. Pembebasan

PPh impor pada 19 sektor tertentu dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah juga melakukan pengurangan PPh 25 sebesar 30% terhadap sektor KITE dan wajib pajak KITE industri kecil menengah. Penurunan sebesar 22% pada tahun 2020 dan 2021 dan menjadi 20% pada awal tahun 2022 juga diberlakukan terhadap tarif PPh. Dan juga pemerintah memberikan insentif dalam skema pembayaran KUR (kredit usaha rakyat).

#### 4.2 Dampak dan Kebijakan yang Dilakukan dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Malaysia

Pada saat ini negara Malaysia juga terkena dampak *Coronavirus* ini. Berdasarkan data yang telah disajikan kumparan.com, total kasus yang ada per 14 Mei di negara Malaysia ada 6.819, untuk jumlah kematian ada 110 orang dan untuk jumlah kesembuhan ada 5.565 orang. Kebijakan yang dilakukan Malaysia untuk menekan penyebaran virus ini adalah kebijakan pembatasan gerak mulai dari 18 Maret 2020 – hingga 29 April 2020. Data tersebut dapat dilihat dalam grafik dibawah ini yang bersumber dari kumparan.com



Gambar 1. Data Kasus Covid-19 di Malaysia  
Sumber: kumparan.com, 13 Mei 2020

Beberapa kebijakan yang dilakukan Malaysia untuk mencegah persebaran virus lebih parah dikutip dari berita harian cnn Indonesia yaitu :

1. Larangan menyeluruh aktivitas massal seperti olahraga, budaya dan keagamaan
2. Melarang warga Malaysia untuk keluar Negeri
3. Menutup akses warga negara asing untuk datang ke Malaysia
4. Penutupan segala jenis sekolah termasuk perkuliahan dan institusi
5. Penutupan seluruh kantor pemerinta dan swasta kecuali yang berhubungan dengan public

Lalu bagaimana dengan perekonomian di Malaysia? Berikut adalah beberapa keputusan yang diambil oleh pemerintah Malaysia yang dikutip dari majalah Tempo:

1. Untuk menanggulangi pandemi Covid-19, pemerintah Malaysia mengeluarkan 2 paket kebijakan ekonomi. yang pertama ialah sebanyak US \$ 4,8 miliar yang digelontorkan pada Februari akhir tahun 2020 dan yang kedua yaitu sebanyak US \$ 57 miliar dikeluarkan pada Maret akhir tahun 2020.
2. Untuk mengatasi berkurangnya pendapatan dan resiko menganggur, pemerintah memberikan bantuan tunai langsung kepada keluarga kelas menengah kebawah senilai US \$ 2,2 miliar. Bantuan senilai US \$ 366 per bulan akan diberikan kepada rumah tangga yang berpenghasilan US \$ 916, sedangkan untuk yang berpenghasilan lebih tinggi akan mendapatkan nilai bantuan yang lebih kecil.
3. Pemerintah Malaysia juga memberikan bantuan sara hidup dengan melakukan pencairan dana Negara sebesar US \$ 735 juta, dengan berupa bantuan keuangan pada setiap tahunnya yang didistribusikan kepada rumah tangga.
4. Program lainnya yaitu bantuan internet dalam rangka membantu masyarakat yang melakukan pekerjaan dan proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah. Untuk program internet gratis pemerintah berjanji akan mengeluarkan US \$ 138 juta yang akan dilakukan pada tanggal 1 April 2020 hingga selama pandemi Covid-19 berlangsung.
5. Orang yang penghasilannya kurang dari US \$ 916 perbulan akan mendapatkan bantuan US \$ 137 per bulan selama tiga bulan kedepan
6. Dana khusus disiapkan bagi petani dan asosiasi nelayan untuk mengembangkan proyek pertanian pangan dalam jangka pendek yang dapat menghasilkan pendapatan dalam waktu 3-6 bulan. Dana ini disediakan guna memastikan pasokan makanan cukup selama pandemic
7. Pemerintah memberikan izin penundaan pembayaran angsuran pajak penghasilan untuk semua UKM dan sektor pariwisata
8. Tunjangan kesehatan untuk dokter, perawat dan kesehatan sebesar RM 400 – 600 lalu tunjangan untuk petugas garis depan seperti polis, bea cukai, petugas imigrasi diberikan sebesar 200 RM.

Namun Kebijakan ini mendapatkan respons yang masih dinilai kurang menyeluruh. Dikutip dari perkataan ahli ekonomi yaitu Nadia Jalil bahwa paket stimulus ini kurang memperhatikan UMKM, diperkirakan program subsidi baru mencakup 3,3 juta pekerja dari 9 hingga 10 juta para pekerja UMKM. Meskipun dapat UMKM dapat menggunakan moratorium pinjaman dan melakukan pinjaman lunak, UMKM masih dalam keadaan yang sulit untuk bertahan ditengah pandemi ini

Lalu dari Fazil Iwan Som, Direktur Eksekutif International Strategy Institute menilai bahwa program yang telah diberikan pemerintah Malaysia ini masih kurang dalam rangka melindungi perekonomian Malaysia. Menurut beliau runtuhnya bisnis dalam ukuran apapun secara massal berarti hilangnya pekerjaan jutaan orang.

### 4.3 Dampak dan Kebijakan yang Dilakukan dalam Menangani Penyebaran Covid-19 di Arab Saudi

Penyebaran Covid-19 hingga akhirnya menjangkit penduduk di Arab Saudi tercatat pada 2 Maret 2020. Dilansir dari himbuan yang dipublikasi oleh Kemenlu RI, kasus pertama yang ditemukan berasal dari penduduk WN Arab Saudi yang datang dari Iran. Dengan adanya kasus yang terkonfirmasi ini pemerintah Arab Saudi pun memperketat pengawasan dan upaya-upaya untuk meredam penyebaran virus corona.

Beberapa hari sebelum kasus pertama terjadi di Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi telah mengambil langkah preventif terkait penyebaran virus corona. Pada 27 Februari 2020, Arab Saudi mengeluarkan kebijakan terkait pelarangan kedatangan jemaat umrah internasional yang dilanjut dengan pelarangan sementara kegiatan umrah bagi warga domestik. Selain itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menetapkan kebijakan-kebijakan preventif lainnya paska kasus pertama yang terjadi 2 Maret silam. Beberapa di antaranya adalah pelarangan sementara perjalanan ke negara-negara tertentu, pemberhentian sementara kegiatan belajar mengajar di instansi pendidikan, hingga penerapan *lockdown* dan isolasi mandiri.

Dengan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Arab Saudi terkait penghambatan penyebaran virus corona, tentunya berdampak pada perekonomian negara tersebut. Salah satunya adalah ketidakstabilan harga. Pemerintah Arab Saudi melakukan upaya dalam mencegah terjadinya gejolak harga yang ekstrim dengan cara memberikan denda sebesar 1 juta riyal kepada pelaku yang berusaha melakukan *commercial fraud* dengan memanfaatkan situasi. Serta untuk meningkatkan efektivitas dari kebijakan ini, pemerintah Arab Saudi juga memberikan *reward* bagi warganya yang melaporkan tindakan kriminal tersebut.

Dampak yang cukup dirasakan oleh penduduk Arab Saudi akibat pandemi ini ialah berkurangnya pendapatan dan kesulitan dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Maka dari itu pemerintah Arab Saudi memberikan subsidi-subsidi guna meringankan beban masyarakat. Subsidi yang cukup krusial guna menangani pandemi ini ialah pengobatan gratis bagi pasien Covid-19. Pengobatan gratis ditujukan pada pasien terdampak virus corona baik warga pribumi Arab Saudi dan juga ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi baik legal maupun ilegal. Selain itu Pemerintah Provinsi Mekah menyediakan tempat karantina sehat yang layak untuk ditinggali bagi para mahasiswa yang tinggal di asrama.

Dana intensif untuk keperluan medis disiapkan sebesar 47 miliar riyal oleh pemerintah Arab Saudi dengan harapan dapat memberantas virus corona secepatnya. Subsidi tidak hanya ditujukan pada sektor medis guna menangani penyebaran virus corona, tetapi juga dialokasikan kepada sektor swasta untuk membangkitkan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi global ini. Dana sebesar 50 miliar riyal digelontorkan kepada pihak swasta yang ditargetkan kepada UKM dan kegiatan usaha yang terkena dampak paling besar akibat pandemi. Potongan biaya tagihan listrik sebesar 30% diberikan kepada perusahaan sektor komersial, industri, dan pertanian untuk tagihan pada bulan April dan Mei (bulan selanjutnya bila

diperlukan). Dan juga gaji 1,2 juta karyawan yang bekerja di sektor yang terkena dampak corona selama 3 bulan ditanggung oleh pemerintah sebesar 60%.

#### **4.4 Perbandingan Kebijakan Indonesia dengan Malaysia dan Arab Saudi**

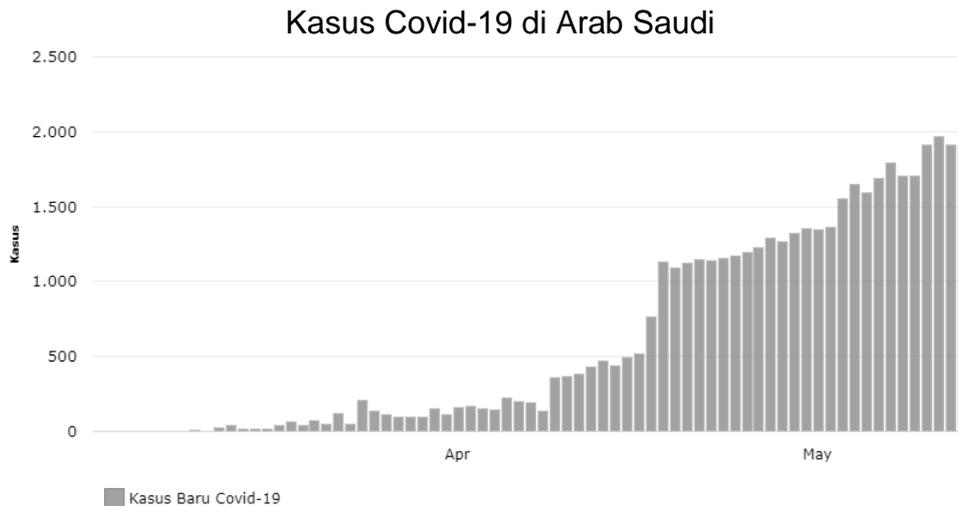
Jika dibandingkan dengan Malaysia, kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan lebih beragam dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya. Bantuan tersebut diberikan pemerintah Indonesia dibagi menjadi tiga aspek utama yaitu aspek kesehatan, aspek sosial, dan juga aspek ekonomi. Namun Pemerintah Malaysia lebih banyak menyalurkan dana bantuan kepada masyarakatnya dibandingkan Pemerintah Indonesia yaitu lebih dari 50 miliar USD sementara Pemerintah Indonesia sekitar 270 juta USD. Terlebih lagi perlu dipertimbangkan terkait efektivitas bantuan ini mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan penduduk Malaysia sehingga kuantitas bantuan per kapita yang diterima oleh masing-masing rumah tangga akan sangat berbeda.

Terdapat banyak sektor yang dapat dicontoh oleh Indonesia dari Malaysia untuk diberikan subsidi dan bantuan seperti bantuan uang kepada pegiat UMKM agar aspek ekonomi dari kalangan masyarakat kelas menengah ke bawah masih tetap produktif dan membantu stabilisasi ekonomi nasional. Serta dana yang digelontorkan perlu ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki jumlah masyarakat dan jumlah kasus positif yang lebih banyak dibanding Malaysia.

Jika dibandingkan dari data di atas maka dapat dikatakan kebijakan di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia masih kurang efektif untuk menangani kasus virus ini karena dari jumlah kasus perhari yang terus bertambah lebih banyak dari Malaysia, lalu jumlah kematian yang juga bertambah setiap harinya menunjukkan masih kurang efektifnya kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi virus Covid – 19 ini.

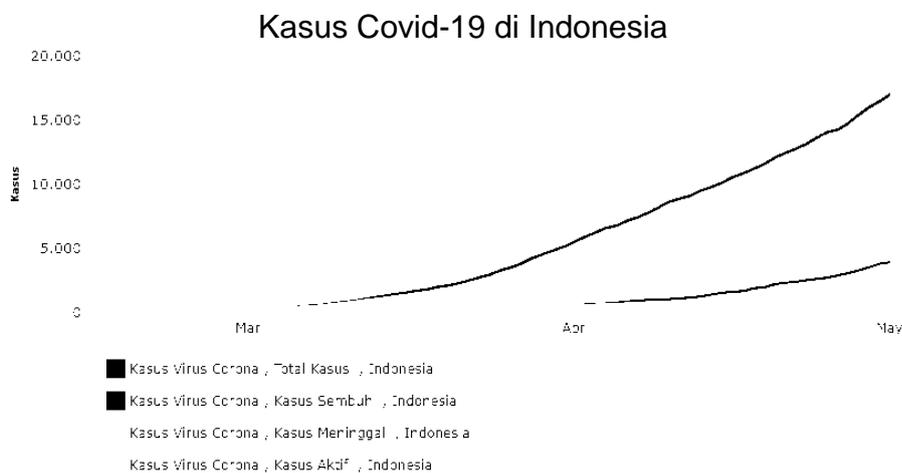
Kebijakan yang diambil oleh Indonesia dalam menangani pandemi ini berfokus pada perlindungan tenaga medis dalam pencegahan dan pengobatan dari virus corona. Selanjutnya fokus yang diberikan dari pemerintah ialah kepada aspek sosial dan kemudian pada sektor ekonomi. Upaya pemulihan ekonomi yang diterapkan di Indonesia banyaknya berupa keringanan dalam pembayaran pajak. Sementara pada pemerintahan Arab Saudi dana dialokasikan lebih ke arah insentif kepada sektor swasta dalam rangka menangani kerugian akibat corona.

Hingga saat per 13 Mei 2020 total masyarakat yang telah terkonfirmasi positif corona di Arab Saudi sebanyak 44.830 dengan jumlah sembuh sebanyak 17.622 dan meninggal dunia sebanyak 273. Arab Saudi dengan kasus positif sebanyak itu mampu menahan korban jiwa pada angka yang relatif rendah. Akan tetapi pola penyebaran kasus positif Covid-19 masih cenderung meningkat setiap harinya.



**Gambar 2. Data Kasus Covid-19 di Arab Saudi**  
 Sumber: Kementerian Kesehatan Arab Saudi, 13 Mei 2020

Sedangkan di Indonesia, kasus positif corona per 16 Mei 2020 sebanyak 17.025 dengan total pasien sembuh 3.911 dan meninggal dunia sebanyak 1.089 orang. Jumlah kasus meninggal dunia di Indonesia lebih banyak dibanding Arab Saudi walaupun memiliki kasus positif jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan performa tenaga medis di Arab Saudi yang sangat baik dibanding Indonesia dalam menangani kasus corona. Walau demikian dari hari ke hari pasien yang sembuh dari kasus positif covid-19 di Indonesia mengalami peningkatan.



**Gambar 3. Data Kasus Covid-19 di Indonesia**  
 Sumber: Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 16 Mei 2020

Pada dasarnya untuk menciptakan kondisi ekonomi yang stabil negara dengan kondisi saat ini ialah dengan berfokus pada penyelesaian akar permasalahannya yaitu penyebaran virus corona. Dengan menyulutnya persebaran virus corona maka keadaan akan kembali normal yang kemudian akan membuat

perekonomian kembali stabil dengan lebih mudah. Sehingga dengan berfokus pada perlindungan tenaga medis merupakan langkah yang tepat dalam menangani virus corona ini.

Dalam penerapan kebijakan dari sektor kesehatan, Indonesia cenderung terlambat mengambil keputusan. Dibanding dengan Arab Saudi yang telah bersiap menghadapi corona bahkan sebelum terjadi kasus positif di negaranya, Indonesia justru terkesan menganggap remeh kasus tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kebijakan Arab Saudi yang menutup total ka'bah selang beberapa hari setelah kasus positif pertama di Arab Saudi. Sementara di Indonesia penerapan karantina wilayah baru saja dilaksanakan di awal April ketika kasus positif sudah hampir menyentuh angka 2.000.

Dengan hasil yang cukup memuaskan dalam angka kematian yang rendah, ada beberapa kebijakan yang mungkin dapat ditiru oleh Indonesia dari Arab Saudi. Salah satunya adalah penerapan jam malam pada kota-kota yang dianggap memiliki persebaran yang sangat masif. Kemudian diperkuat dengan otoritas yang diberi wewenang untuk memperketat pemeriksaan di semua akses pada kota-kota zona merah. Selanjutnya penerapan denda bagi yang melanggar juga dapat ditiru demi meningkatkan kedisiplinan masyarakat.

## 5. Kesimpulan dan Keterbatasan

Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi global dan telah tercatat berbagai kasus yang sudah terkonfirmasi di berbagai Negara termasuk Indonesia. Dalam upaya pengentasan dampak Covid-19 pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas berupa *refocusing* dalam pengelolaan anggaran dengan beberapa prioritas utama, yaitu pada bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi dimana pemerintah Indonesia sudah menggelontorkan dana sebesar 405,1 triliun rupiah.

Pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh Negara-negara lainnya, seperti halnya Malaysia dan juga Arab Saudi. Kedua Negara tersebut juga melakukan upaya tegas dalam pengentasan dampak Covid-19, namun dengan caranya masing-masing. Kebijakan yang dilakukan Malaysia untuk menekan penyebaran virus ini adalah kebijakan pembatasan gerak yang dimulai pada pertengahan Maret 2020. Dalam menanggulangi dampak pandemic ini, pemerintah Malaysia mengeluarkan 2 paket kebijakan ekonomi, sebanyak US\$ 4,8 miliar dan yang US\$ 57. Sedangkan langkah Pemerintah Arab Saudi dalam pengentasan pandemi ini, dimulai dengan upaya preventif pada 27 Februari 2020, dimana Arab Saudi mengeluarkan kebijakan pelarangan kedatangan jemaat umrah internasional dan kemudian dilanjut dengan kebijakan pembatasan gerak. Dana intensif untuk keperluan medis disiapkan sebesar 47 miliar riyal oleh pemerintah Arab Saudi dan dana sebesar 50 miliar riyal digelontorkan kepada pihak swasta yang ditargetkan kepada UKM dan kegiatan usaha yang terkena dampak paling besar akibat pandemi.

Jika dibandingkan dengan Malaysia, kebijakan Indonesia dalam memberikan bantuan lebih beragam dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya. Namun Pemerintah Malaysia lebih banyak menyalurkan dana bantuan kepada

masyarakatnya dibandingkan Pemerintah Indonesia yaitu lebih dari 50 miliar USD sementara Pemerintah Indonesia sekitar 270 juta USD. Dilihat dari jumlah kasus perhari yang terus bertambah lebih banyak dari Malaysia serta jumlah kematian yang juga bertambah setiap harinya, menunjukkan masih kurang efektifnya kebijakan Indonesia dalam menghadapi pandemi virus Covid – 19 ini.

Dalam penerapan kebijakan dari sektor kesehatan, Indonesia cenderung terlambat mengambil keputusan dibanding Arab Saudi yang telah bersiap menghadapi corona sebelum terjadi kasus positif di negaranya. Jumlah kasus meninggal dunia di Indonesia lebih banyak dibanding Arab Saudi walaupun memiliki kasus positif jauh lebih sedikit. Hal ini menunjukkan performa tenaga medis di Arab Saudi yang sangat baik dibanding Indonesia. Ada beberapa kebijakan yang dapat ditiru oleh Indonesia dari Arab Saudi, yang pertama adalah penerapan jam malam pada kota-kota yang dianggap memiliki persebaran yang sangat masif. Kemudian memberikan otoritas wewenang untuk memperketat pemeriksaan di semua akses pada kota-kota zona merah. Selanjutnya penerapan denda bagi yang melanggar peraturan guna meningkatkan kedisiplinan

Pada penelitian ini peneliti mengalami kesulitan dalam pengumpulan data. Kendala dialami sebab situasi yang sedang tidak memungkinkan untuk memperoleh data lapangan. Dengan demikian peneliti hanya memanfaatkan data yang tersedia di internet. Sehingga keberagaman dalam mendapatkan informasi kurang maksimal.

## Referensi

- [1]Abdul, M. (2020). *ILO memperkirakan 25 juta pekerjaan hilang akibat wabah corona. Malaysia dan Singapura menyiapkan sejumlah skema penyelamatan.*<https://majalah.tempo.co/read/laporan-utama/160180/bagaimana-strategi-ekonomi-malaysia-dan-singapura-menghadapi-wabah-corona>
- [2]Arum, R. 2020. Pembatasan Sosial Di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau Dari Sudut Pandang Politik. *Politic Solitic*.
- [3]Azzahra, T. A. 2020. *BNPB Ulas Proses Penanganan Wabah Virus Corona di Indonesia.*  
<https://news.detik.com/berita/d-4987504/bnpb-ulas-proses-penanganan-wabah-virus-corona-di-indonesia>
- [4]BPHN. 2011. *No Title.* <https://www.bphn.go.id/data/documents/pkj-2011-9.pdf>
- [5]Budiantoro. (n.d.). *POLICY B RIEF Subsidi Dalam Penguatan Kebijakan Fiskal Pro Kemiskinan.*
- [6]CNN Indonesia. 2020. *Enam Hal yang ditekankan Malaysia Saat Lockdown Atasi Corona.*<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200316224120-106-484036/enam-hal-yang-ditekankan-malaysia-saat-lockdown-atasi-corona>
- [7]Faisal, B. (n.d.). *Perekonomian Indonesia: tantangan dan harapan bagi kebangkitanekonomi Indonesia.* Erlangga.
- [8]Farisa, F. C. 2020. *Update : Bertambah 214, Kini ada 9096 kasus Corona di Indonesia.*

- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/16050691/update-bertambah-214-kini-ada-9096-kasus-covid-19-di-indonesia>
- [9] Guy, J. S., Breslin, J. J., Breuhaus, B., Vivrette, S., & Smith, L. G. 2000. Characterization of a coronavirus isolated from a diarrheic foal. *Journal of Clinical Microbiology*, 38(12), 4523–4526. <https://doi.org/10.1128/jcm.38.12.4523-4526.2000>
- [10] Handoko, R., & Patriadi, P. 2005. Evaluasi Kebijakan Subsidi Non-BBM. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 9, 42–64.
- [11] Holmes, K.V. & Lai, M.M.C. *Coronaviridae. in Fields Virology (eds. Fields, B.N. et al.)* 1075–1093 (Lippincott-Raven Publishers, Philadelphia, 1996).
- [12] Ihsanuddin. 2020. *Fakta Lengkap kasus Pertama Virus Corona di Indonesia*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- [13] Jatmiko, A. 2020. *Malaysia Kucurkan Stimulus Rp 929 Triliun Meredam Efek Corona*. <https://katadata.co.id/berita/2020/03/27/malaysia-kucurkan-stimulus-rp-929-triliun-meredam-efek-negatif-corona>
- [14] Milton H. Spencer & Orley M. Amos, Jr., *Contemporary Economics*, Edisi ke-8, hal. 464, 1993, Worth Publishers, New York
- [15] Munawar, D., Utama, W., & Cimahi, B. 2013. *Dungtji Munawar@2013| Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN Memahami Pengertian dan Kebijakan Subsidi dalam APBN*. 22.
- [16] Purwoko. 2003. Analisis Peran Subsidi Bagi Industri dan Masyarakat Pengguna Listrik. *Jurnal Keuangan Dan Moneter*, 6, 44.
- [17] Putri, C. A. 2020. *Maaf, Tapi Stimulus Covid-19 RI Lebih Kecil dari Malaysia Cs*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200420132136-4-153099/maaf-tapi-stimulus-covid-19-ri-lebih-kecil-dari-malaysia-cs>
- [18] Rika, A. 2020. *Semakin Tingginya Tingkat Pengangguran di Tengah Wabah Covid – 19*. <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/68294-Semakin-Tingginya-Tingkat-Pengangguran-di-Tengah-Wabah-Covid-19>
- [19] Setiawan, Y. I. S. 2020. *Penetapan Karantina Wilayah Menurut Pandangan Legal Positivisme Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Pandemi Coronavirus Disease (Covid)-19*.
- [20] Sugiarto, D. 2020. *Begini Virus Corona Lumpuhkan Ekonomi RI*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4957376/begini-virus-corona-lumpuhkan-ekonomi-ri>
- [21] Tjandra, W. R. 2006. "Hukum Keuangan Negara". In *Hukum Keuangan Negara* (1st ed., pp. 1–2). PT Grasindo, 2006.
- [22] Umar, abdullah. M. 2020. *Kebijakan Arab Saudi Menghadapi Pandemi Corona*. <https://news.detik.com/kolom/d-4990098/kebijakan-arab-saudi-menghadapi-pandemi-corona>

- [23]Van Der Hoek, L., Pyrc, K., Jebbink, M. F., Vermeulen-Oost, W., Berkhout, R. J. M., Wolthers, K. C., Wertheim-Van Dillen, P. M. E., Kaandorp, J., Spaargaren, J., & Berkhout, B. 2004. Identification of a new human coronavirus. *Nature Medicine*, 10(4), 368–373. <https://doi.org/10.1038/nm1024>
- [24]Worldometer. 2020. *Malaysia Corona Virus Cases*.  
[https://www.worldometers.info/coronavirus/country/malaysia/?fbclid=IwAR2YwcpzFDJ7W8xsrtpndU6HcRSbxB86q5H0paOuwpRqITWHFs\\_gy9yNeQ](https://www.worldometers.info/coronavirus/country/malaysia/?fbclid=IwAR2YwcpzFDJ7W8xsrtpndU6HcRSbxB86q5H0paOuwpRqITWHFs_gy9yNeQ)
- [25]Wareza, M. 2020. *Jokowi Tebar Stimulus Rp 405,1 T, Ini Rinciannya*.  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200404094318-4-149748/jokowi-tebar-stimulus-rp-4051-t-ini-rincian-efek-ke-apbn>
- [26]Yunus, N. R., & Rezki, A. 2020. Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>